

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MALAKA**

**Nama : Jufrince Joana Tafuli**

**Nim : 19190371**

**Fakultas : Ekonomi**

**Program Studi : Akuntansi**

Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi yang menjadi suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. penyajian laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Merupakan kemudahan bagi seorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantungjawab kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh penelitian. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (Openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidakhanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah 41 pegawai yang terdapat di BPKPD kabupaten Malaka. Jumlah sampel yang digunakan peneliti ini sebanyak 41

pegawai. Penelitian ini bersifat kuantitatif data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, dan diukur dengan skala ordinal. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis statistik menggunakan spss versi 16 menunjukkan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai signifikansinya  $0,172 > 0,05$   $t$  hitung  $< t$  tabel hasil =  $-1,391 < 2,024$  maka  $H_1$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah nilai signifikansi  $0,706 > 0,05$ .  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel  $0,380 < 2,052$ . Yaitu hasil uji  $t$  secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah  $0,706 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $0,380 < 2,052$  maka  $H_2$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah nilai signifikansi  $0,028 > 0,05$ , dan  $t$  hitung  $> t$  tabel  $2,280 > 2,052$  maka  $H_3$  diterima artinya terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara positif.

Melalui penelitian ini penulis menyarankan bagi BPKPD Kabupaten Malaka agar memperhatikan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan transparansi di BPKPD Kabupaten Malaka. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti pengendalian internal dan tingkat pengungkapan laporan keuangan.